

**(LAKIP)**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**TAHUN 2021**



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN SUMEDANG**  
Jln. Mayor Abdurahman No. 200 Sumedang

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- 6) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP di Kabupaten Sumedang.

### **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Sumedang, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Keadudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Anak Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

#### **1.3.1. Tugas**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **1.3.2. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, pembinaan dan Pemberdayaan Sosial ;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial dan bidang Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial dan Pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

### **1.3.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang**

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi:
  - 1) Sub bagian Program
  - 2) Sub bagian Umum, Aset dan Kepegawaian
  - 3) Sub bagian Keuangan

- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
  - 1) Seksi Pelayanan Sosial
  - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :
  - 1) Seksi Perlindungan Sosial
  - 2) Seksi Jaminan Sosial;
- e. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial :
  - 1) Seksi Pembinaan Sosial;
  - 2) Seksi Pemberdayaan Sosial;
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
  - 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan;
  - 2) Seksi Perlindungan Anak;
- g. UPTD Rumah Singgah
  - 1) Kasubag Tata Usaha

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 1.1  
Struktur Organisasi  
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Sumedang



#### 1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sebagai OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2019-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal dalam hal ini Kementerian

Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang periode 2019-2023.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan dimaksud dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1  
Identifikasi Permasalahan Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

No	Urusan	Permasalahan
	<b>SOSIAL</b>	
1	Permasalahan dalam Aspek Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses jangkauan pelayanan yang sangat luas</li> <li>2. Data PMKS kurang akurat</li> <li>3. Belum tersedianya sarana dan fasilitas penampungan klien yang perlu di <i>assessment</i></li> <li>4. Ketergantungan anggaran dari pusat</li> </ol>
2	Permasalahan dalam Aspek Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data kemiskinan yang belum akurat</li> <li>2. Adanya potensi rawan bencana</li> <li>3. Buffer stock untuk korban bencana masih minim</li> <li>4. Ketergantungan anggaran bencana dari pusat</li> <li>5. Bantuan sosial masih ada yang belum tepat sasaran</li> </ol>
3	Permasalahan dalam Aspek Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peranan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) kurang maksimal</li> <li>2. Belum terintegrasinya pelayanan kesejahteraan sosial tingkat desa</li> <li>3. Masih kurangnya Pelestarian akan nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial</li> <li>4. Taman Makam Pahlawan kurang sesuai standar</li> </ol>
<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
1	Permasalahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data gender dan anak belum akurat</li> <li>2. Akses jangkauan pelayanan sangat luas</li> <li>3. Belum tersedianya sarana dan fasilitas untuk penanganan perempuan dan anak</li> <li>4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian tindak kekerasan</li> </ol>



## 1.5 Uraian Singkat Organisasi

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam lima tahun kedepan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang harus berperan aktif dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut. Perwujudan Misi ini oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang bertujuan untuk mewujudkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan Arah Kebijakan Penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang mempunyai tugas pokok **Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan Tata Kerjanya di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan

Sosial, Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sumedang memiliki manfaat antara lain untuk:

1. Mendorong Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sebagai salah satu Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumedang untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sebagai salah satu Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumedang yang akuntabel sehingga pelaksanaan tugas dilakukan secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat serta lingkungannya.

Menjadi bahan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumedang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

##### **2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Sumedang 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;

4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang adalah Misi ke-1 yaitu **Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat**. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang terintegrasi Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak secara Optimal	Persentase Perempuan Korban tindak Kekerasan	Meningkatnya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak secara Optimal	Persentase Perempuan yang Mampu memenuhi kehidupan Keluarga
		Persentase Perempuan yang Mampu memenuhi kehidupan Keluarga		Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak
		Kabupaten Layak Anak	Kabupaten Layak Anak	

### **2.1.3 Strategi**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang untuk periode 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Peningkatan penanganan bagi Korban Bencana;
3. Penguatan kapasitas dan kualitas mitra sosial;
4. Peningkatan Nilai-nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
5. Peningkatan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
6. Penguatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
7. Peningkatan pemberdayaan perempuan.

### **2.1.4 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2019 - 2023 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan**

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	Menyelenggarakan pelayanan terhadap PMKS secara merata untuk semua wilayah;
2.	Peningkatan penanganan bagi Korban Bencana;	Meningkatkan penanganan korban bencana alam dan sosial selama dan setelah tanggap darurat;
3.	Penguatan kapasitas dan kualitas mitra sosial;	Meningkatkan peran mitra sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Sosial (PMKS);
4.	Peningkatan Nilai-nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;	Meningkatkan pemeliharaan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
5.	Peningkatan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak;	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak;
6.	Penguatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;	Meningkatkan peran serta perempuan di bidang politik, sosial dan ekonomi.
7.	Peningkatan pemberdayaan perempuan.	Menyelenggarakan pelayanan terhadap PMKS secara merata untuk semua wilayah;

### 2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2021, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
2	Meningkatnya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak secara Optimal	Persentase Perempuan yang Mampu Memenuhi Kehidupan Keluarga Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
1	2	3	4
		Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Kabupaten Layak Anak	Program Perlindungan Khusus Anak
3	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		SAKIP Perangkat Daerah	

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	60	Persen	Program Pemberdayaan Sosial	2,000,000,000	APBD			
					Program Rehabilitasi Sosial	1,919,750,000	APBD			
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,850,000,000	APBD			
					Program Penanganan Bencana	405,000,000	APBD			
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	150,000,000	APBD			
2	Meningkatnya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak secara Optimal	Persentase Perempuan yang Mampu Memenuhi Kehidupan Keluarga	0.2015	Persen	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	150,000,000	APBD			
					Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan	0.003	Persen	Program Perlindungan Perempuan	75,000,000	APBD
					Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak	0.005	Persen	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100,000,000	APBD
		Kabupaten Layak Anak	701	Skor	Program Perlindungan Khusus Anak	75,000,000	APBD			
3	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27.23	Poin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,381,360,980	APBD			
		SAKIP Perangkat Daerah	A	Skor						
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>13,106,110,980</b>				



**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	60	Persen	Program Pemberdayaan Sosial	1.200.000.000	APBD			
					Program Rehabilitasi Sosial	1.689.279.700	APBD			
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	951.293.000	APBD			
					Program Penanganan Bencana	359.700.000	APBD			
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	136.450.000	APBD			
2	Meningkatnya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak secara Optimal	Persentase Perempuan yang Mampu Memenuhi Kehidupan Keluarga	0.2015	Persen	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	338,192,000	APBD			
					Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan	0.003	Persen	Program Perlindungan Perempuan	75,000,000	APBD
					Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak	0.005	Persen	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	250.000.000	APBD
					Kabupaten Layak Anak	701	Skor	Program Perlindungan Khusus Anak	75,000,000	APBD
3	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27.23	Poin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.042.914.953	APBD			
		SAKIP Perangkat Daerah	A	Skor						
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>11.117.829.653</b>				

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	7,65
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100
		Kabupaten Layak Anak	Skor	701
4	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkatkan Ekonomi Keluarganya	Persen	3,7
5	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Skor	A
		Jumlah Inovasi SKPD	Inovasi	3
		Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	Persen	95
		Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi	Persen	75

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja, 2021.

### 3.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

#### 1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

##### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Adapun perbandingan antara target kinerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja SKPD dengan Realisasi Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja  
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2021		
					Target	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	10.05	7,65	7,91	103,40

Adapun penjelasan capaian dari tabel berikut adalah Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indikator sasaran Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memiliki target kinerja pada tahun ke-3 tahun 2021 sebesar 7,65 Persen atau sebanyak 8,812 dari total populasi PMKS sebanyak 115.190 dan realisasi dari indikator tersebut sebesar 7,91% atau sebanyak 9.112 Orang. Capaian tersebut didukung oleh beberapa Program diantaranya Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Penanganan Bencana.

**b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan antara target kinerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja SKPD dengan Realisasi Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja  
Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	8	9	10
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	10.05	8.45	8.1	121.88

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Tabel 3.5  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD  
Tahun 2021

No.	Indikator Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	RPJMD	Renstra				
1.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	7,65	7,91	89,17

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan pada Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Data PMKS menurut jenis permasalahan merupakan data yang menjabarkan/mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Jumlah PMKS bertambah seiring dengan munculnya masalah ekonomi, sosial dan politik dan kecil kemungkinan bisa menurun. Maka dari itu perlu dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta tindak lanjut/solusi yang harus dilakukan.

### 1) Faktor Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Dari capaian indikator kinerja IKU yang pertama yaitu Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan capaian kinerja lebih dari 100 persen yaitu 103,4% masuk pada kriteria sangat tinggi atau dapat dikatakan “berhasil”. Faktor keberhasilan ini yakni :

- a. Dilakukannya pelayanan sosial yang telah diberikan kepada publik atau masyarakat secara maksimal. Selain pelayanan juga dilakukan bantuan yang bersifat konsultatif ataupun koordinatif yang bersifat persuasif dan motivasi kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik secara perorangan, keluarga, kelompok, maupun kelembagaan sosial lainnya.
- b. Dilaksanakannya Program Bantuan Sosial seperti JKN/Jamkesda/PBI, Pendampingan Rutilahu, PKH dan BNPT, SLRT, Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial, Penanganan Orang Terlantar, Pemberian Alat Bantu pada Penyandang Disabilitas Terlantar, Pemberian Bantuan Sembako untuk Lanjut Usia Terlantar dan Pemberian Bantuan Sembako untuk Gelandangan Pengemis.
- c. Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ditetapkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam menangani berbagai permasalahan telah banyak membantu dalam penanganan masalah sosial terutama yang sifatnya lintas kabupaten/kota dan provinsi.

### 2) Faktor Penghambat / Kegagalan / Penurunan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu semua jenis PMKS dikabupaten Sumedang belum bisa terakomodir secara maksimal

dikarenakan keterbatasan SDM, pagu anggaran, dan aturan Pemerndagri 90 tentang Program dan Kegiatan. Selain itu pada tahun 2021 terjadi pandemi COVID-19 yang berakibat melemahnya perekonomian sehingga menambah jumlah PMKS dengan kriteria Fakir Miskin di Kabupaten Sumedang. Peningkatnya fakir miskin saat pandemi dikarenakan adanya penurunan pendapatan, penurunan kegiatan ekonomi, dan meningkatnya angka pengangguran. Selain itu tidak tercapainya PMKS yang mengalami perubahan perilaku disebabkan antara lain :

- Sulit mengubah pola pikir PMKS agar lebih mandiri;
- PMKS yang telah ditangani (pembinaan) kembali melakukan aktifitas sebagai PMKS karena merasa lebih mudah mendapat penghasilan;
- PMKS yang telah ditangani tidak bersedia untuk dirujuk ke Balai untuk mengikuti pelatihan sehingga tidak bisa mandiri;

### 3) Alternatif / Solusi Yang Telah Dilakukan

Untuk meningkatkan capaian indikator terutama indikator pada urusan Sosial dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka perlu dilakukan beberapa hal berikut ini :

1. Perencanaan kegiatan sesuai petunjuk teknis dan mengutamakan program prioritas yang telah ditetapkan terutama yang berkaitan dengan SPM Sosial;
2. Memberikan pembinaan kepada PMKS agar tidak lagi melakukan kegiatan PMKS;
  - Melakukan evaluasi kinerja para petugas atau mitra sosial;
  - Berkonsultasi dan koordinasi dengan Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat dan Kementerian Sosial.



## e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Sosial didukung oleh Capaian untuk urusan sosial pada tahun anggaran 2021, diimplementasikan melalui 5 Program, 6 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan dukungan pagu anggaran sebesar Rp. 4.336.722.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.305.356.991,- (99,28%).

Tabel 3.6  
Capaian Kinerja dengan realisasi keuangan Urusan Sosial Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
1	2	3	4	5	
<b>URUSAN SOSIAL</b>					
1	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>		<b>1.200.000.000</b>	<b>1.181.103.500,-</b>	<b>98,42</b>
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>1.200.000.000</b>	<b>1.181.103.500,-</b>	<b>98,42</b>
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	1.200.000.000	1.181.103.500,-	91,21
2	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>		<b>1.689.279.700,-</b>	<b>1.685.305.200,-</b>	<b>99,76</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial</b>		<b>1.689.279.700,-</b>	<b>1.685.305.200,-</b>	<b>99,76</b>
		Penyediaan Permakanan	1.405.892.000,-	1.404.202.000,-	99,87
		Penyediaan Sandang	95.624.700,-	95.624.700,-	100,00
		Penyediaan Alat Bantu	133.227.500,-	131.943.000,-	99,03
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	54.535.500,-	53.535.500,-	98,16

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
1	2	3	4	5	
3	<b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>		951.293.000,-	944.652.000,-	99,30
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		951.293.000,-	944.652.000,-	99,30
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota	417.945.000	415.764.000,-	99,48
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	533.348.000,-	528.888.000,-	99,16
4	<b>Program Penanganan Bencana</b>		359.700.000,-	358.046.291,-	99,54
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>		229.700.000,-	229.486.000,-	99,91
		Penyediaan Makanan	229.700.000,-	229.486.000,-	99,91
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>		130.000.000,-	128.560.291,-	98,89
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	130.000.000,-	128.560.291,-	98,89
5	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>		136.450.000,-	136.250.000,-	99,85
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota</b>		136.450.000,-	136.250.000,-	99,85
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	74.450.000,-	74.250.000,-	99,73
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	38.000.000,-	38.000.000,-	100,00
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	24.000.000,-	24.000.000,-	100,00
<b>TOTAL PAGU ANGGARAN URUSAN SOSIAL</b>			<b>4.336.722.700,-</b>	<b>4.305.356.991,-</b>	<b>99,28</b>

Tabel 3.7  
Efisiensi Indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	103,40	99,28	-4.12	Efisien

**f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Adapun analisis Program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pada keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja pada tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Program Pemberdayaan Sosial**

- 1) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota

➤ Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000, diperoleh realisasi keuangan Rp.1.181.103.500,- atau 91,21%.

Output : Jumlah Puskesmas yang dibentuk disetiap desa (277 Lembaga)

Outcome : Tersedianya Puskesmas yang dibentuk (266 Lembaga)

Capaian % : 96,02 %

**b. Program Rehabilitasi Sosial**

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial

- Penyediaan Permakanan dengan pagu anggaran Rp.1.405.892.000,- diperoleh realisasi sebesar Rp. 1.404.202.000,- atau 99,87%.

Output : Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima bantuan Pemakanan (4805 Orang)

Outcome : Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima bantuan Pemakanan (4816 Orang)

Capaian %:100,22%

- Penyediaan Sandang dengan pagu anggaran Rp. 95.624.700,- diperoleh realisasi sebesar Rp. 95.624.700,- atau 100%.

Output : Persentase Penerima Bantuan Sosial Sandang (100 Persen)

Outcome : Persentase Penerima Bantuan Sosial Sandang (100 Persen)

Capaian : 100%

- Penyediaan Alat Bantu dengan pagu anggaran Rp. 133.227.500,- diperoleh realisasi sebesar Rp. 131.943.000,- atau 99,03%.

Output : Jumlah Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu (129 Orang)

Outcome : Jumlah Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu (110 Persen)

Capaian : 91,67%

- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan pagu anggaran Rp. 54.535.500,- diperoleh realisasi sebesar Rp. 53.535.500,- atau 98,16%.

Output : Persentase Pemberian Runifikasi Keluarga (100 Persen)

Outcome : Persentase Pemberian Runifikasi Keluarga (100 Persen)

Capaian : 100%

### c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

#### 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 417.945.000,- diperoleh realisasi sebesar Rp. 415.764.000,- atau 99,48%.

Output : Jumlah Dokumen Basis Data Terpadu (1 Dokumen)

Outcome : Jumlah Dokumen Basis Data Terpadu (1 Dokumen)

Capaian : 100%

- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pagu anggaran Rp. 533.348.000,- diperoleh realisasi sebesar Rp. 528.888.000,- atau 99,16%.

Output : Jumlah DTKS Penerima Bantuan (130.070 Orang)

Outcome : DTKS yang Menerima Bantuan (129.477 Orang)

Capaian : 99.54%

### d. Program Penanganan Bencana

#### 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- Penyediaan Makanan dengan pagu anggaran Rp. 229.700.000,- diperoleh realisasi sebesar Rp. 229.486.000,- atau 99,91%.

Output : Persentase Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Bantuan (100 Persen)

Outcome : Persentase Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Bantuan (100 Persen)

Capaian : 100%

2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana  
Kabupaten/Kota

➤ Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Output : Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam  
Penanganan Kebencanaan (51 Orang)

Outcome : Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam  
Penanganan Kebencanaan (51 Orang)

Capaian : 100%

**e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota

➤ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional

Kabupaten / Kota

Output : Jumlah Makam direhabilitasi (3 Lokasi)

Outcome : Jumlah Makam direhabilitasi (3 Lokasi)

Capaian : 100%

➤ Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota

Output : Jumlah Makam Pahlawan yang dipelihara (3 Lokasi)

Outcome : Jumlah Makam Pahlawan yang dipelihara (3 Lokasi)

Capaian : 100%

➤ Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota

Output : Jumlah Jasa Pengamanan Makam (3 Orang)

Outcome : Jumlah Jasa Pengamanan Makam (3 Orang)

Capaian : 100%

## 2. Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak

### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Adapun perbandingan antara target kinerja indikator Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja SKPD dengan Realisasi Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8  
Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak  
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2021		
					Target	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100	100	100	100

Pencapaian indikator kinerja utama ini yaitu 100%. Dalam artian setiap pengaduan ataupun kasus mengenai perlindungan perempuan dan anak dalam tindak kekerasan semua nya tertangani dan terlayani.

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Adapun perbandingan antara target kinerja indikator Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja SKPD dengan Target Jangka Menengah RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9  
 Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak  
 Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2021		
					Target	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100	100	100	100

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Penyebabnya adalah kualitas SDM pemberi pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan di samping itu adanya dukungan dana yang cukup untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

- a. Untuk menurunkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilaksanakan koordinasi dengan Kab/Kota, Aparat Penegak Hukum, OPD terkait, P2TP2A, Desa/kelurahan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak lainnya.
- b. Advokasi bagi petugas kabupaten/kota, APH, tentang pencegahan kekerasan.

**d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2021 khususnya untuk mendukung capaian indikator Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak diimplementasikan melalui 2 Program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan dukungan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 149.991.600,- (99,99%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:





Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021				Total Realisasi s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
			Triwulan						
			I	II	III	IV			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	12 laporan	3	3	3	3	3	12,00	-
<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>Persentase Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	115 Orang	0	0	100	0	100	0,00	-

**e. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Adapun analisis Program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pada keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja pada Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Program Perlindungan Perempuan**

**a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000,- diperoleh realisasi sebesar Rp. 75.000.000, atau 100%

Output : Jumlah Laporan Koordinasi dan 12  
Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Laporan  
Program dan Kegiatan Pencegahan  
Kekerasan terhadap Perempuan

Outcome : Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi 12  
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Laporan  
Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap  
Perempuan

Capaian : 100 %

## **2. Program Perlindungan Khusus Anak**

### **a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak  
Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 75.000.000,-  
diperoleh realisasi Rp. 74.991.600,- atau 99,99%.

Output : Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi 115  
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Orang

Outcome : Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi 100  
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Orang

Capaian : 86,96%

## **3. Kabupaten Layak Anak**

### **a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Adapun perbandingan antara target kinerja indikator Kabupaten Layak Anak yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja SKPD dengan Realisasi

Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

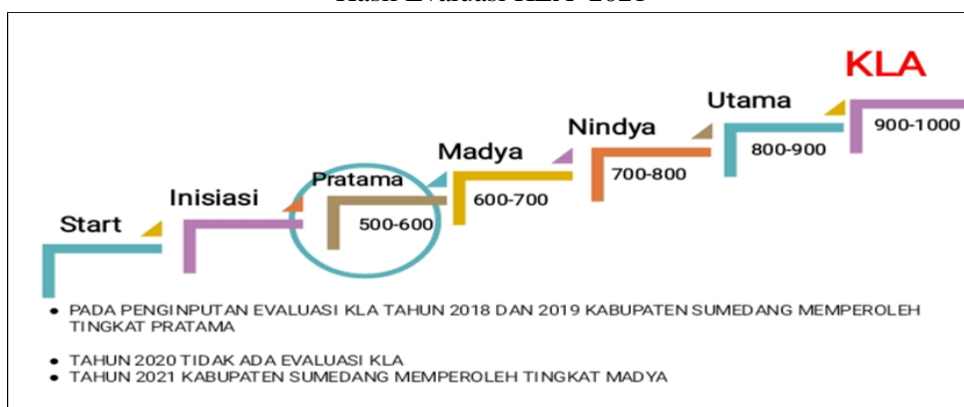
Tabel 3.12  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja  
Pada Indikator Kabupaten Layak Anak  
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Sumedang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2021		
					Target	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Kabupaten Layak Anak	Skor	501	701	600	85,59

a

Pada indikator ini pada tahun 2021 ditargetkan Skor Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sumedang yaitu sebesar 701. Pada tahun ke-3 (tahun 2021) diperoleh skor 600 atau peringkat madya dari hasil penginputan evaluasi KLA pada tahun 2021 diperoleh peringkat Madya.

Gambar 3.1  
Hasil Evaluasi KLA 2021



#### b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan antara target kinerja indikator Kabupaten Layak Anak yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja SKPD dengan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13  
Perbandingan Antara Realisasi dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya  
Pada Indikator Kabupaten Layak Anak  
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Sumedang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020			Tahun 2021		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>				<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Kabupaten Layak Anak	Skor	501	650	Tidak ada penilaian	-	701	600	85,59

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Adapun perbandingan antara Realisasi kinerja indikator Kabupaten Layak Anak yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja SKPD dengan Target Jangka Menengah RPJMD Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14  
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD  
Pada Indikator Kabupaten Layak Anak  
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Sumedang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2021		
					Target RPJMD	Realisasi	Capaian
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Kabupaten Layak Anak	Skor	501	701	600	85,59

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

**1. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja indikator Kabupaten Layak Anak**

Faktor yang mendukung keberhasilan dan peningkatan Kabupaten Layak Anak dapat dilihat pada indikator berikut ini:

1) Kelembagaan

- Ada Kebijakan/Peraturan Kades/Lurah tentang Perlindungan Anak
- Gugus Tugas DELA/KELA Aktif
- Ada Profil Anak Desa/Kelurahan yang terpilah dengan berbagai karakteristik
- Ada Rencana Aksi Desa/Kelurahan menuju DELA/KELA
- Dukungan LM, Dunia Usaha,dan Media (lokal)

2) Klaster 1 ( Hak Sipil Dan Kebebasan)

- Persentase anak diregistrasi kelahirannya (memiliki Akta Kelahiran)
- Ada layanan informasi anak (ILA), termasuk ketersediaan ILA di ruang publik (a.l Ruang Baca/ Pojok Baca)
- Forum Anak Desa/Kelurahan aktif dalam Musrenbang Desa/Kelurahan
- Forum Anak Desa/Kelurahan berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)

- 3) Klaster 2 (Lingkungan Kelg Dan Pengasuhan Alternatif)
  - Tidak ada perkawinan anak
  - Ada layanan PAUD-HI
  - Ada layanan konsultasi keluarga
  - Ada Ruang Bermain Ramah Anak
- 4) Klaster 3 ( Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan)
  - Semua anak sehat, tidak ada gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, stunting,
  - Ada ruang publik tanpa asap rokok
- 5) Klaster 4 (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya)
  - Semua anak bersekolah, mendapatkan pendidikan (formal/non-formal)
  - Ada kegiatan-kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif bagi anak (pemanfaatan waktu luang anak, di luar waktu sekolah)
- 6) Klaster 5 (Perlindungan Khusus Anak)
  - Tidak ada kekerasan terhadap anak: tidak ada pekerja anak, ABH, ABK, dll ( 15 Kategori AMPK)  
 Jika ada anak yg menjadi korban, maka harus diberikan layanan dan kasus dituntaskan.

**e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2021 khususnya untuk mendukung capaian indikator Kabupaten Layak Anak diimplementasikan melalui 1 Program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan dukungan pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan

teralisasi sebesar Rp. 249.100.000,- (99,64%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15  
Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan  
pada Indikator Kabupaten Layak Anak  
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Sumedang

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Pergeseran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
1	2	3	4	5	
1	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		250.000.000	249.100.000	99,64
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyelenggara Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota		250.000.000	249.100.000	99,64
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	200.000.000	199.550.000	99,78
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	50.000.000	49.550.000	99,1
<b>Total Pagu Anggaran</b>			<b>663.192.000</b>	<b>633.610.000</b>	<b>95,54</b>



Tabel 3.16  
Realisasi Fisik Program dan Kegiatan  
pada Indikator Kabupaten Layak Anak  
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Sumedang

Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021				Total Realisasi s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
			Triwulan						
			I	II	III	IV			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
<b>Urusan P3A</b>									-
<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>	<b>Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak</b>	<b>19,23 Persen</b>	<b>0</b>	<b>30,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,77</b>	<b>30,77</b>	<b>-</b>
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Layanan Peningkatan Kualitas hidup Anak	12 laporan	3	3	3	3	12	100	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	12 laporan	3	3	3	3	12	100	-

## f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

### 1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

#### a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota

- Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000 diperoleh realisasi sebesar Rp. 199.550.000,- atau 99,78%.

Output : Jumlah Laporan Layanan Peningkatan 12  
Kualitas hidup Anak Laporan

Outcome : Jumlah Laporan Layanan Peningkatan 12  
Kualitas hidup Anak Laporan

Capaian : 100%

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,- diperoleh realisasi sebesar Rp. 49.550.000,- atau 99,1%

Output : Jumlah Laporan Koordinasi dan 12  
Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Laporan  
Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Outcome : Jumlah Laporan Koordinasi dan 12  
Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Laporan  
Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Capaian : 100%

#### **4. Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkat Ekonomi Keluarganya**

##### **a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Adapun perbandingan antara target kinerja indikator Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkat Ekonomi Keluarganya yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja SKPD dengan Realisasi Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17  
 Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkat Ekonomi Keluarganya  
 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Kabupaten Sumedang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2021		
					Target	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkat Ekonomi Keluarganya	Persen	0,7	3,7	3,65	98,63

Pencapaian indikator ini sampai dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 54 orang dari populasi jumlah perempuan kepala keluarga yang produktif sebanyak 8.221 (0.7%). Bila melihat target dari Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD sebagaimana tabel 3.1 diharapkan di tahun 2021 tercapai Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) sebanyak 1,7% (222 Pekka). Adapun yang rincian mengenai Perempuan Kepala keluarga yaitu :

- Yang telah mengikuti pelatihan pemberdayaan / dibentuk Pekka sebanyak 131 Pekka;
- Yang telah berdaya dan mampu meningkatkan perekonomiannya sebanyak 54 pekka.

**b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.17  
 Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkatkan Ekonomi keluarganya  
 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Kabupaten Sumedang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2020			Tahun 2021		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkatkan Ekonomi keluarganya	Persen	0,7	2,7	9,7	359,26	3,7	3,65	98,63

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja indikator Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkatkan Ekonomi keluarganya dengan Target Jangka Menengah RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.18  
 Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD  
 Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkatkan Ekonomi keluarganya  
 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Kabupaten Sumedang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2021		
					Target RPJMD	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkatkan Ekonomi keluarganya	Persen	0,7	3,7	3,65	98,63

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

**1. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan**

Dalam mendongkrak peningkatan persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkat Ekonomi Keluarganya ditentukan pada faktor keberhasilan atau peningkatan kinerja berikut dibawah ini:

- 1) Meningkatnya Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga
- 2) Meningkatnya Jumlah Perempuan yang mandiri
- 3) Meningkatnya jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang berdaya
- 4) Terjalannya kerjasama atau kolaborasi pentahelix dengan stakeholder terkait atau dunia usaha atau dunia permodalan.

**2. Faktor Penghambat atau kegagalan**

- 1) Kurang kolaborasi Pentahelix antara Perempuan Kepala Keluarga dengan Stakeholder
- 2) Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia Perempuan Kepala Keluarga dalam pengembangan usaha

**3. Solusi/tindak lanjut**

- 1) Dilakukan pembinaan, sosialisasi, Bimtek secara bertahap
- 2) Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia permodalan untuk meningkatkan modal usaha.

**e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2021 khususnya untuk mendukung capaian indikator persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkat Ekonomi Keluarganya diimplementasikan melalui 1 Program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan

dukungan pagu anggaran sebesar Rp. 338.192.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 309.510.000,- (91,52%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.19  
Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan  
Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkatkan Ekonomi keluarganya  
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Sumedang

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Pergeseran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
1	2	3	4	5	
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		338.192.000	309.510.000	91,52
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten / Kota		338.192.000	309.510.000	91,52
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	338.192.000	309.510.000	91,52
Total Pagu Anggaran			338.192.000	309.510.000	91,52

Tabel 3.19  
Realisasi Fisik Program dan Kegiatan  
Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Meningkatkan Ekonomi keluarganya  
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Sumedang

Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021				Total Realisasi s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
			Triwulan						
			I	II	III	IV			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
Urusan P3A									-
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD Responsip Gender	29.90 Persen		45,16			45,16	45,16	-
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Gender Analysis Pathway Gender Budget Statement (GAPGBS)	1 Dokumen	0	0	0	1	1	0,00	-

Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021				Total Realisasi s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
			Triwulan						
			I	II	III	IV			
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	2 Kali	0	2	0	0	2	100,00	-

**f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

**1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan  
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga  
Pemerintahan Kewenangan Kabupaten / Kota**

- Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG dengan pagu sebesar Rp. 338.192.000, diperoleh realisasi sebesar Rp. 309.510.000 atau 91,52%.

Output : Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG 2 Kali termasuk PPRG

Outcome : Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG 2 Kali termasuk PPRG

Capaian : 100%

### 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2020

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2020 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 59,78%, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.20**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran
					Rp	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
<b>URUSAN SOSIAL</b>				<b>7,405,403,950</b>	<b>3,635,088,642</b>		
Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya	3,852,048,000	187,052,000	4.86	(3,664,996,000)
		Pemberdayaan PMKS melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Jumlah Masyarakat Miskin yang mengikuti Pembinaan UEP	-	-	-	-
		Pemberdayaan Sosial KUBE Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok yang diberdayakan melalui Program KUBE	3,740,000,000	75,850,000	2.03	(3,664,150,000)
		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Kelompok yang dibina	112,048,000	111,202,000	99	(846,000)
		<b>Program Jaminan Sosial</b>	<b>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial</b>	<b>1,750,079,650</b>	<b>1,705,566,650</b>	<b>97.46</b>	<b>(44,513,000)</b>
		Pendampingan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Jumlah Kepala Keluarga yang Menerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	79,150,000	79,150,000	-	-
		Pendampingan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai / Rastra	Jumlah KK yang menerima Bantuan Sosial Pangan Non Tunai / Rastra	42,244,000	41,244,000	98	(1,000,000)
		Pendampingan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	252,135,750	237,813,150	94.32	(14,322,600)



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran
					Rp	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
		Peningkatan Peran Mitra Sosial dalam Keterpaduan Penanganan Bidang Sosial dan Kesehatan	Jumlah Mitra dalam penanganan Bidang Sosial dan Kesehatan	-	-	-	-
		Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	Jumlah Dokumen Basis Data Terpadu	788,805,000	764,735,900	96.95	(24,069,100 )
		Pelayanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Daerah	Jumlah Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan yang Terintegrasi Sistem JKN	114,553,200	113,033,200	98.67	(1,520,000)
		Jaminan Sosial bagi Korban Bencana Setelah Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Jaminan	473,191,700	469,590,400	99.24	(3,601,300)
		<b>Program Perlindungan Sosial</b>	<b>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</b>	<b>195,750,000</b>	<b>191,085,624</b>	<b>97.62</b>	<b>(4,664,376)</b>
		Penanganan Masalah-masalah Strategis Menyangkut Tanggap Darurat Bencana Alam dan bencana Sosial	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial	195,750,000	191,085,624	97.62	(4,664,376)
		Penguatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Dalam Penanganan Bencana	Intensitas Penguatan Taruna Siaga bencana	-	-	-	-
		Fasilitasi Kegiatan Keserasian Sosial, Kearifan Lokal dan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Desa yang menerima Fasilitasi Keserasian Sosial, Kearifan Lokal dan Kampung Siaga Bencana	-	-	-	-
		<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar</b>	<b>1,039,686,300</b>	<b>985,722,368</b>	<b>94.81</b>	<b>(53,963,932 )</b>
			<b>Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Dasarnya</b>				
			<b>Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya Dasarnya</b>				

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran
					Rp	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
			<b>Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya</b>				
			<b>Persentase PMKS yang diRehabilitasi</b>				
		Pelayanan dan Operasional Rumah Singgah	Persentase Client yang dilayani	42,869,950	42,865,500	99.99	(4,450)
		Penanganan PMKS Jalanan	Penanganan PMKS jalanan yang ditangani	62,843,800	53,003,800	84.34	(9,840,000)
		Penyuluhan Rehabilitasi Sosial Keliling	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan Rehabilitasi Sosial	11,985,400	11,405,400	95.16	(580,000)
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti yang menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	457,718,900	454,495,900	99.30	(3,223,000)
		Bimbingan Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti	Jumlah Keluarga Penyandang disabilitas Terlantar diluar Panti yang menerima Bimbingan Sosial	-	-	-	-
		Rehabilitasi Tuna Susila	Jumlah Tuna Susila yang menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	-	-	-	-
		Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis dan Pemulung Terlantar	Jumlah Gelandangan, Pengemis dan Pemulung Terlantar yang menerima bantuan sosial	-	-	-	-
		Rehabilitasi Sosial Pengidap HIV / AIDS (ODHA)	Jumlah Pengidap HIV / AIDS (ODHA) yang menerima bantuan sosial	-	-	-	-
		Rehabilitasi Sosial Eks Warga Binaan Perumahan	Jumlah Eks Warga Binaan yang menerima bantuan Sosial	-	-	-	-
		Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar Yang Menerima Bantuan Sosial	44,330,250	43,881,250	98.99	(449,000)
		Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum	Jumlah Anak berhadapan dengan Hukum yang menerima bantuan sosial	24,950,000	24,950,000	100	-
		Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar diluar Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	192,258,000	190,998,000	99.34	(1,260,000)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran
					Rp	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
		Penyusunan Kebijakan Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kebijakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	37,000,000	575,000	2	(36,425,000)
		Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Tidak Potensial	Jumlah Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Tidak Potensial yang menerima Jaminan	22,970,000	22,970,000	100	-
		Pelayanan Terpadu Fakir Miskin dan Lansia	Jumlah Sarana dan prasarana	142,760,000	140,577,518	98.47	(2,182,482)
		Pelayanan Terpadu Fakir Miskin dan Lansia (DAK Fisi Reguler)		-	-	-	-
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti (DAK Fisik Reguler)		-	-	-	-
		Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Luar Panti (DAK Fisik)		-	-	-	-
		Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar diluar Panti (DAK Fisik Reguler)		-	-	-	-
		<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial</b>	<b>Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan sosial yang aktif</b>	<b>456,226,750</b>	<b>454,726,750</b>	<b>99.67</b>	<b>(1,500,000)</b>
		Penyusunan Kebijakan Tentang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah kebijakan Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-
		Penguatan Peranan Karang Taruna di Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pengurus Karang Taruna yang dibina	39,369,250	39,369,250	100	-
		Penguatan Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina	52,900,000	52,900,000	100	-
		Penguatan Peranan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), LK3 dan Peksos	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	45,370,000	45,370,000	100	-
		Penguatan Peranan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina	-	-	-	-
		Rumah Besar Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)	Jumlah Puskesmas yang dibentuk di setiap desa	318,587,500	317,087,500	99.53	(1,500,000)
		<b>Program Kelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan</b>	<b>Persentase Pemeliharaan TMP Daerah dan Nasional</b>	<b>111,613,250</b>	<b>110,935,250</b>	<b>99.39</b>	<b>(678,000)</b>
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Daerah dan Nasional	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	83,360,000	82,682,000	99.19	(678,000)
		Peringatan Hari Pahlawan dan HKSAN	Jumlah Peringatan Hari Pahlawan dan HKSAN	28,253,250	28,253,250	100	-

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran	
					Rp	%		
1	2	3	4	6	7	8	9	
<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>859,449,050</b>	<b>736,174,050</b>	<b>85.66</b>	<b>(123,275,000)</b>	
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani	227,272,900	141,847,900	62.41	(85,425,000)	
	Kabupaten Layak Anak		Persentase Kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak		85,425,000	37.59	85,425,000	
Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkat Ekonomi Keluarganya	Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	91,656,200	91,656,200	100	-	
		Advokasi Sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan peningkatan Kualitas Hidup dan Anak	Jumlah peserta advokasi dan sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup dan Anak	-	-	-	-	
		Pencegahan Kekerasan termasuk TPPO Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	50,191,700	50,191,700	100	-	
		Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak	-	-	-	-	
		Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan Pendidikan dan Budaya	Jumlah Sekolah Ramah Anak	-	-	-	-	
		Penguatan Kelembagaan Anak	Jumlah Forum/Lembaga yang dibentuk	39,087,750	39,087,750	100	-	
		Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Intensitas Pengembangan Kabupaten Layak Anak	46,337,250	46,337,250	100	-	
		Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Persentase OPD Responsif Gender	Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender yang dihasilkan	129,592,100	128,592,100	99.23	(1,000,000)
								-
				Perumusan Kebijakan gender dan Anak	Jumlah Kebijakan Gender dan Anak	-	-	-
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Intensitas Penguatan Kelembagaan PUG			60,605,800	59,605,800	98.35	(1,000,000)	

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran
					Rp	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
		Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender	Intensitas Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE	-	-	-	-
		Pelatihan Perencana dan Penganggaran Responsif gender	Jumlah OPD yang dibina dalam Perencana dan Penganggaran Responsif gender dan Anak	-	-	-	-
		Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak	68,986,300	68,986,300	100	-
		Pengarusutamaan Gender	Jumlah Penghargaan APE	-	-	-	-
		<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>	<b>Persentase Organisasi wanita yang aktif</b>	<b>111,275,000</b>	<b>103,775,000</b>	<b>93.26</b>	<b>(7,500,000)</b>
		Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum dan Sosial	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan	-	-	-	-
		Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kesetaraan gender	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kesetaraan Gender	-	-	-	-
		Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi yang dibina	111,275,000	103,775,000	93.26	(7,500,000)
		Pembinaan Organisasi Masyarakat	Jumlah Organisasi yang dibina	-	-	-	-
		<b>Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga</b>	<b>391,309,050</b>	<b>361,959,050</b>	<b>92.50</b>	<b>(29,350,000 )</b>
		Pembinaan P2WKSS	Jumlah Perempuan yang dibina melalui Program P2WKSS	85,985,200	85,985,200	100	-
		Peningkatan Manajemen Perempuan Dalam Mengelola Usaha	Jumlah Kelompok PEKKA yang dibina	-	-	-	-
		Peningkatan Ketahanan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang dibina	-	-	-	-
		Penyuluhan Bagi Ibu-ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah Peserta Penyuluhan	-	-	-	-
		Pemberdayaan Perempuan Dalam Keluarga	Jumlah Perempuan yang dibina	70,834,650	70,634,650	-	(200,000)
		Peningkatan Peran Perempuan dalam membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah Perempuan yang dibina	102,307,500	84,407,500	-	(17,900,000)
		Pemberdayaan Perempuan dalam Organisasi	Jumlah perempuan yang dibina	132,181,700	120,931,700	91.49	(11,250,000)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran
					Rp	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
		Integrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Perempuan yang dibina melalui	-	-	-	-
<b>BELANJA WAJIB SKPD (ADUM)</b>				<b>2,061,532,350</b>	<b>1,802,110,631</b>	<b>87.42</b>	<b>(259,421,719)</b>
<b>Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah</b>	<b>Tingkat penyerapan anggaran</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,092,217,400</b>	<b>881,748,139</b>	<b>80.73</b>	<b>(210,469,261)</b>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	75,000,000	35,208,310	46.94	(39,791,690)
		Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	439,857,800	428,107,800	97.33	(11,750,000)
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	9,219,600	9,180,000	99.57	(39,600)
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Koordinasi	398,040,000	240,893,779	60.52	(157,146,221)
		Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	7,500,000	5,808,250	77.44	(1,691,750)
		Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan Kantor	90,000,000	90,000,000	100	-
		Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	72,600,000	72,550,000	99.93	(50,000)
	<b>Indeks Pembangunan Zona Integritas / Reformasi Birokrasi</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>720,184,950</b>	<b>683,032,492</b>	<b>94.84</b>	<b>(37,152,458)</b>
		Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Peralatan Kantor	167,500,000	166,704,000	-	(796,000)
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	42,920,700	42,752,000	99.61	(168,700)
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	316,340,000	287,145,992	90.77	(29,194,008)
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor / Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor / Gedung Kantor yang dipelihara	16,600,000	10,211,500	61.52	(6,388,500)
		Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Halaman Kantor yang ditata	-	-	-	-
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Bangunan Kantor yang di Rehab	176,824,250	176,219,000	-	(605,250)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran
					Rp	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>29,400,000</b>	<b>19,600,000</b>	<b>67</b>	<b>(9,800,000)</b>
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan	-	-	-	-
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Intensitas Peningkatan Kapasitas Aparatur	29,400,000	19,600,000	66.67	(9,800,000)
		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	-	-	-	-
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	-	-	-
	<b>Jumlah Inovasi SKPD</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja</b>	<b>123,510,000</b>	<b>121,510,000</b>	<b>98.38</b>	<b>(2,000,000)</b>
			<b>Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja Akutansi Pemerintah Daerah</b>				
		Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	88,610,000	86,610,000	97.74	(2,000,000)
		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	34,900,000	34,900,000	100	-
	<b>Nilai Sakip SKPD</b>	<b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>	<b>Persentase Kesesuaian Dokumen perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan lima Tahunan SKPD</b>	<b>52,370,000</b>	<b>52,370,000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
			<b>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD</b>				
		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	52,370,000	52,370,000	100	-
		<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>	<b>Persentase Ketersediaan Data Kepegawaian</b>	<b>43,850,000</b>	<b>43,850,000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran
					Rp	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang Dikelola	43,850,000	43,850,000	100	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>10,326,385,350</b>	<b>6,173,373,323</b>	<b>59.78</b>	<b>4,153,012,027)</b>

**Tabel 3.21**  
**Rincian Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan**  
**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Pergeseran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
1	2	3	4	5	
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		<b>6.042.914.953</b>	<b>5.274.284.472</b>	<b>87,28</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>121.315.000</b>	<b>112.045.000</b>	<b>92,36</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.790.000,-	33.245.000,-	95,55
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	7.725.000	7.725.000,-	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	7.975.000	7.725.000,-	96,86
		Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	8.475.000	1.500.000,-	17,69
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	11.000.000	10.500.000,-	95,45
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	51.350.000	51.350.000,-	100
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>4.645.053.953,-</b>	<b>4.431.971.840,-</b>	<b>95,41</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.620.053.953,-	4.406.971.840,-	95,38



No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Pergeseran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	25.000.000,-	25.000.000,-	100
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.500.000,-	25.500.000,-	100
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	19.560.000,-	19.560.000,-	100
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>322.263.410,-</b>	<b>322.247.450</b>	<b>100</b>
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.001.200,-	71.001.200,-	100,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000,-	70.000.000,-	100,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.250,-	25.000.250,-	100,00
		Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	9.999.960,-	9.984.000,-	100,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.262.000,-	146.262.000,-	100,00
	<b>Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>505.002.000,-</b>	<b>472.860.831,-</b>	<b>93,64</b>
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	70.002.000,-	37.860.831,-	54,08
		Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,-	15.000.000,-	100,00
		Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	420.000.000,-	420.000.000,-	100,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>404.220.590,-</b>	<b>389.366.090,-</b>	<b>96,33</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	200.000.000,-	185.947.500,-	92,97

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Pergeseran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	204.220.590,-	203.418.590,-	99,61
2	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>		<b>1.200.000.000</b>	<b>1.181.103.500,-</b>	<b>98,42</b>
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>1.200.000.000</b>	<b>1.181.103.500,-</b>	<b>98,42</b>
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	1.200.000.000	1.181.103.500,-	91,21
3	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>		<b>1.689.279.700,-</b>	<b>1.685.305.200,-</b>	<b>99,76</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial</b>		<b>1.689.279.700,-</b>	<b>1.685.305.200,-</b>	<b>99,76</b>
		Penyediaan Permakanan	1.405.892.000,-	1.404.202.000,-	99,87
		Penyediaan Sandang	95.624.700,-	95.624.700,-	100,00
		Penyediaan Alat Bantu	133.227.500,-	131.943.000,-	99,03
		Pemberian Pelyanan Reunifikasi Keluarga	54.535.500,-	53.535.500,-	98,16
4	<b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>		<b>951.293.000,-</b>	<b>944.652.000,-</b>	<b>99,30</b>
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>951.293.000,-</b>	<b>944.652.000,-</b>	<b>99,30</b>
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota	417.945.000	415.764.000,-	99,48
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	533.348.000,-	528.888.000,-	99,16

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Pergeseran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
5	<b>Program Penangan Bencana</b>		<b>359.700.000,-</b>	<b>358.046.291,-</b>	<b>99,54</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>		<b>229.700.000,-</b>	<b>229.486.000,-</b>	<b>99,91</b>
		Penyediaan Makanan	229.700.000,-	229.486.000,-	99,91
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>		<b>130.000.000,-</b>	<b>128.560.291,-</b>	<b>98,89</b>
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	130.000.000,-	128.560.291,-	98,89
6	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>		<b>136.450.000,-</b>	<b>136.250.000,-</b>	<b>99,85</b>
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota</b>		<b>136.450.000,-</b>	<b>136.250.000,-</b>	<b>99,85</b>
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	74.450.000,-	74.250.000,-	99,73
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	38.000.000,-	38.000.000,-	100,00
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	24.000.000,-	24.000.000,-	100,00
7	<b>Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</b>		<b>338.192.000,-</b>	<b>309.510.000,-</b>	<b>91,52</b>
	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten / Kota</b>		<b>338.192.000,-</b>	<b>309.510.000,-</b>	<b>91,52</b>
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	338.192.000,-	309.510.000,-	91,52

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Pergeseran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
8	Program Perlindungan Perempuan		75.000.000,-	75.000.000,-	100,00
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota		75.000.000,-	75.000.000,-	100,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	75.000.000,-	75.000.000,-	100,00
9	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		250.000.000,-	249.100.000,-	99,64
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyelia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota		250.000.000,-	249.100.000,-	99,64
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	200.000.000,-	199.550.000,-	99,78
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	50.000.000,-	49.550.000	99,10
10	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		75.000.000,-	74.991.600,-	99,99
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota		75.000.000,-	74.991.600,-	99,99
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	75.000.000,-	74.991.600,-	99,99
		<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>	<b>11.117.829.653</b>	<b>10.787.509.802,-</b>	<b>97,03</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Secara umum capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2021 rata-rata sebesar 49,94% (Sangat Rendah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 103,40% (Tinggi);
- 2) Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar 100%. (Tinggi);
- 3) Kabupaten Layak Anak sebesar 85,59% (Tinggi);
- 4) Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkat Ekonomi keluarganya dengan capaian sebesar 98,63% (Tinggi).
- 5) Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat daerah dengan capaian sebesar 102,12% (Sangat Tinggi);
- 6) Jumlah Inovasi SKPD dengan capaian sebesar 100%;
- 7) Capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah belum dilakukan penilaian pada tahun 2021.
- 8) Capaian kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan capaian kriteria belum tersedia nilai dikarenakan belum dilakukan penilaian.

#### **4.2 Perbaikan Kedepan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2021, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial khususnya dalam Pemberian Bantuan Sosial harus merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif terhadap stakeholder terkait sehingga dalam penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan dapat lebih optimal;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2021, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Sumedang,      Desember 2021  
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Sumedang  
Kepala

**H. DIKDIK SADIKI, A.K.S., M.Si.**  
NIP. 19720515 199803 1 010